

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol. 1*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Makassar, Universitas Hasanuddin, 2013.
- Angger Sigit Pramukti dan Meylani Chahyaningsih, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
- Firzhal Arzhi Jiwanta, Ikang Satrya Medyantara, *Kekuatan Eksekutorial Grosse Akta Pengakuan Utang dalam Praktek*”, Guepedia, The First On-Publisher in Indonesia, 2020.
- Handayaniingrat, Suwarno, *Pengantar Studi Administrasi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.2010.
- Idul Rishan, *Komisi Yudisial (Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan)*, Yogyakarta: Genta Press, 2013.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Cet. 3*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Pers, Jakarta, 2006.
- Jum Anggraini, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Muhammad Hardani, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Pustaka Eureka, Surabaya, 2003.
- Paulus Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1993.
- Rheza Pratama, *Pengantar Manajemen*, Deepublish, Yogyakarta, 2017.
- Saiful Anwar, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negar*, Glora Madani Press, Jakarta, 2004.
- Salim H.S dkk, *Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2013.

- Simbolon, Maringan Masry, *Dasar-dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sirajun, dkk, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Titik Triwulan. T, *Hukum Tata Usaha Negara & Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Cetakan ke-3, Kencana, Jakarta, 2016.
- Diana Tantri Cahyaningsih, *Mengurai Effectiveness of Law Anthony Allott*, Jurnal RechtsVinding Online, Volume 27 Maret 2020.
- Firman Umar, *Pengawasan Komisi Yudisial dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2015.
- H. Salim HS, dan Erlies Septiani Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta. 2014.
- Hario Danang Pamudhi, *Tinjauan Ketatanegaraan Dewan Pengawas*, Fakultas Hukum Unpad, 2019.
- Kurnia Ramadhana, Divisi Hukum ICW, *Mempertanyakan Kredibilitas Putusan Pelanggaran Kode Etik KPK*, *Indonesia Corruption Watch*. 2020.
- Laporan Pemantauan Dua Tahun Kinerja KPK 2019-2020, Indonesia Corruption Warch, Transparency Internasional Indonesia, dan Pusat Studi Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK Tahun 2020.
- Laporan Tahunan Dewan Pengawas KPK Tahun 2021.
- Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Perdewas KPK Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK
- Keputusan Presiden RI tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan KPK, Perpres Nomor 112/P Tahun 2019

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUUXVII/2019

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ahli : Dewan Pengawas Hancurkan Independensi KPK*, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16230> Waktu akses Rabu, 19 Februari 2021.

Meltaputri Apriliani, *Kontroversi Pembentukan Dewan Pengawas KPK*, <https://www.kompasiana.com/meltaputriapriliani5124/5dd0b253097f3628e5574fd2/kontroversi-pembentukan-dewan-pengawas-kpk?page=all#sectionall> diakses pukul 12.30 WITA.

Mengapa Dewas KPK tak Kunjung Terbitkan Izin Geledah PDIP, <https://www.republika.co.id/berita/q45q4o409/mengapa-dewas-kpk-tak-kunjung-terbitkan-izin-geledah-pdip> diakses pada tanggal 15 Mei 2022.